

## AKTIVITAS EKONOMI ILEGAL DI PERBATASAN INDONESIA – TIMOR LESTE

Oleh

Vivi Pusvitasary\*

vivi.pusvitasary@unpas.ac.id

### Abstrak

*Aktivitas lintas batas di perbatasan Republik Indonesia (RI) – Timor-Leste tanpa melalui prosedur yang berlaku menunjukkan bahwa persoalan keamanan perbatasan yang bersifat kompleks. Sejak kemerdekaan Timor-Leste pada tahun 2002 hingga saat ini masih ada beberapa segmen batas darat dan laut yang belum tuntas disepakati sehingga dapat mengancam kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. Kawasan perbatasan juga banyak diwarnai oleh berbagai aktivitas pelanggaran hukum lintas batas seperti ilegal trading (perdagangan ilegal), illegal mining (tambang ilegal), illegal dredging/sand (pengerukan pasir ilegal), illegal migration (migrasi ilegal), illegal logging (pencurian kayu), human trafficking (perdagangan manusia), people smuggling (penyeludupan manusia), penyelundupan barang, pencurian ikan (illegal fishing), perompakan (sea piracy), dan sebagainya. Kasus-kasus tersebut sangat merugikan negara karena merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia serta menyebabkan kerugian ekonomi negara. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang pembangunan wilayah, masih banyak wilayah di kawasan perbatasan yang perkembangannya lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Perumusan masalah adalah Bagaimana upaya yang dilakukan kedua pemerintahan baik Indonesia dan Timor-Leste dalam mengatasi masalah aktivitas ekonomi ilegal yang terjadi di daerah perbatasan? Kajian ini menggunakan pendekatan keamanan non-konvensional yang lebih dikenal sebagai human security dimana menekankan peran dan partisipasi warga negara sebagai subjek, artinya menempatkan warga negara yang tinggal di perbatasan menjadi subjek dalam relasi antar-negara. Penulis menggunakan teori rezim keamanan perbatasan yang mengkombinasikan hard border regime dan soft border regime karena tidak hanya menjunjung semangat hidup berdampingan secara damai antar negara tetangga namun maraknya ancaman terorganisir transnasional, imigran gelap, perdagangan manusia, penyeludupan membuat pengelolaan perbatasan negara harus dijaga dengan ketat.*

**Kata kunci:** aktivitas ekonomi ilegal, upaya pengelolaan perbatasan Indonesia – Timor-Leste

---

\* Peneliti Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

### A. Latar Belakang

Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan garis pantai 81.900 km, Indonesia dihadapkan dengan masalah perbatasan yang kompleks. Tantangan dan masalah yang dihadapi Indonesia secara domestik lebih bersifat struktural administratif. Sedangkan secara eksternal berkaitan dengan kemampuan Indonesia dalam mengatasi masalah delimitasi<sup>1</sup>, delineasi<sup>2</sup>, demarkasi<sup>3</sup>, dan ancaman-ancaman non-tradisional baru, serta kemampuan Indonesia dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan negara-negara tetangga lainnya.<sup>4</sup>

Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga yaitu Malaysia, PNG, dan Timor-Leste. Perbatasan darat tersebut tersebar di tiga pulau (Kalimantan, Papua, dan Nusa

Tenggara), serta empat provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan kedaulatan dan atau hak berdaulat dengan 10 negara tetangga yaitu Malaysia, PNG, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, dan Australia. Khusus dengan Timor-Leste, wilayah perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga di sebelah timurnya ini terletak di dua Provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku. Sementara NTT memiliki batas langsung darat dan laut, Maluku hanya memiliki batas laut dengan Timor-Leste. Penyelesaian batas maritim antara Indonesia dengan Timor-Leste, baik Batas Laut Teritorial, Batas Landas Kontinen, maupun Batas ZEE masih harus menunggu penyelesaian batas darat antara kedua negara. Mengingat saat ini batas darat yang terselesaikan baru 97 persen, maka negosiasi batas maritim belum dapat dimulai. Hal ini karena batas laut pada dasarnya adalah kelanjutan dari batas darat.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Delimitasi adalah adalah penentuan/penetapan batas wilayah atau yurisdiksi antara satu negara dengan negara lain.

<sup>2</sup> Delineasi adalah penggambaran hal penting dengan garis dan lambang (tentang peta, dsb).

<sup>3</sup> Demarkasi adalah penegasan batas melalui pemasangan tanda-tanda batas di sepanjang garis perbatasan darat yang disepakati.

<sup>4</sup> Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014. Dalam [http://www.wdsworldbank.org/external/default/WDSCContentServer/WDSP/IB/2012/04/24/000020953\\_20120424131952/Rendered/PDF/682610WP0P11840order0Areas0201102014.pdf](http://www.wdsworldbank.org/external/default/WDSCContentServer/WDSP/IB/2012/04/24/000020953_20120424131952/Rendered/PDF/682610WP0P11840order0Areas0201102014.pdf). Diakses tanggal 17 September 2013. Hal. 7.

<sup>5</sup> Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014. *Op.Cit.*, hal. 20.

Perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor-Leste memiliki panjang 268.8 km, melintasi tiga kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara dan Kupang. Perbatasan darat Indonesia dengan Timor-Leste terbagi atas dua sektor, yaitu: (1) Sektor Timur (Sektor utama) di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor-Leste sepanjang 149.1 kilometer; dan (2) Sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi yang merupakan wilayah *enclave* Timor-Leste sepanjang 119.7 km. Hampir sebagian besar besar (99%) batas darat kedua negara berupa batas alam berupa *watershed* dan *thalweg* (bagian terdalam sungai). Delimitasi batas Indonesia dengan Timor-Leste di Pulau Timor mengacu kepada perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan *Permanent Court Award* (PCA) 1914, serta Perjanjian Sementara antara Indonesia dan Timor-Leste pada tanggal 8 April 2005. Perundingan perbatasan antara RI dengan Timor-Leste mulai dilaksanakan sejak tahun 2001 dengan diadakannya

pertemuan pertama *Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation* (TSCBDR) Indonesia-UNTAET (*United Nations Transitional Administration for East Timor*). Batas negara antara RI dan Timor-Leste sebanyak 907 titik-titik koordinat telah ditetapkan dalam persetujuan sementara tentang Perbatasan Darat (*Provisional Agreement*) yang ditandatangani oleh menteri luar negeri kedua negara pada tanggal 8 Juni 2005 di Dili, namun masih ada segmen yang belum terselesaikan dan yang belum disurvei/diukur oleh Tim Survey kedua negara.<sup>6</sup> Beberapa segmen tersebut antara lain terdapat diperbatasan Noelbesi-Kupang, Kefamenamu-Timur Tengah Utara (TTU) dan Malibaka-Belu.<sup>7</sup>

Melihat kenyataan tersebut, maka sudah seharusnya jika pemerintah Indonesia dan Timor-Leste memiliki pandangan yang sama, bahwa masalah penentuan batas teritorial darat merupakan permasalahan yang harus mendapatkan prioritas dalam pembahasan mengenai keamanan. Kedua negara perlu memahami bahwa isu tersebut sangat strategis

<sup>6</sup> Ibid, hal. 23.

<sup>7</sup> Ganewati Wuryandari. *Keamanan Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 9-10.

khususnya dari sisi teritorial, akan memiliki dampak penting bagi batas kedaulatan masing-masing negara dalam mengelola wilayah perbatasannya. Pemahaman ini mendorong pemerintah kedua negara dalam kurun waktu terhitung dari kemerdekaan Timor-Leste pada tahun 2002 hingga tahun 2016 terus berusaha menentukan tapal batas. Namun, ditengah upaya keras menuntaskan masalah batas negara di daratan tersebut, tidak dapat disangkal bahwa persoalan penyeludupan yang berulang kali terjadi di perbatasan Indonesia-Timor-Leste telah mengganggu upaya kedua negara untuk menyelesaikan persoalan demarkasi.<sup>8</sup> Penulis tertarik mengkaji aktivitas ekonomi ilegal yang terjadi di daerah perbatasan Indonesia – Timor-Leste dengan mengajukan *research question* bagaimana upaya yang dilakukan kedua pemerintahan baik Indonesia dan Timor-Leste dalam mengatasi masalah aktivitas ekonomi ilegal yang terjadi di daerah perbatasan.

## B. Kerangka Konseptual

### 1. Teori Keamanan

Pada awalnya, pemahaman mengenai keamanan lebih dikaitkan

dengan upaya penggunaan dan pengendalian kapabilitas militer (konvensional) dalam menghadapi ancaman penggunaan kekerasan bersenjata dari negara lain. Pada masa Perang Dingin, ancaman-ancaman yang dihadapi suatu negara selalu dianggap datang dari luar. Maka, pada saat ini ancaman tersebut bisa datang dari faktor domestik seperti isu-isu yang berkaitan dengan primordialisme. Sifat ancaman pun semakin rumit, karena isu keamanan juga menyangkut aspek-aspek lain (non-konvensional) seperti politik, sosial-ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, dan lain-lain. Akibatnya, isu keamanan yang muncul pun semakin beragam bisa mengenai masalah keamanan ekonomi, keamanan lingkungan hidup, keamanan kesehatan dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, menurut Barry Buzan, Ole Weaver dan Jaap de Wilde, pengertian mengenai keamanan dapat dipahami sebagai “jaminan untuk memperoleh kebutuhan akan sumber-sumber alam, keuangan dan pasar dalam rangka keberlangsungan maupun pencapaian tingkat kesejahteraan dan kekuatan

<sup>8</sup> Ganewati Wuryandari, *Op.Cit*, hal. 9-10.

<sup>9</sup> Ganewati Wuryandari, *Op. Cit*, hal. 28-29.

(power) negara". Sedangkan keamanan sosial diartikan sebagai "keberlangsungan daripada pola-pola budaya, religi, adat istiadat maupun identitas nasional suatu masyarakat dalam batas-batas negara." Sementara yang dimaksud dengan keamanan lingkungan hidup adalah kemampuan untuk memelihara kondisi lingkungan bagi kelangsungan penduduk bumi.<sup>10</sup>

Meskipun pemahaman keamanan dapat dibedakan dalam keamanan konvensional dan keamanan non-konvensional, tetapi tidak berarti bahwa dua pemahaman ini saling berdiri sendiri melainkan saling melengkapi. Isu-isu keamanan non-konvensional, seperti ketidakamanan ekonomi, lingkungan hidup, sosial, kesehatan, pekerja ilegal, perdagangan manusia, hak asasi manusia dan lainnya, apabila tidak ditangani secara baik, secara potensial dapat memicu perselisihan antarnegara yang pada gilirannya dapat mengganggu keamanan nasional suatu negara, dan bahkan regional/global.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Barry Buzan, Ole Weaver and Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. (Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc., 1998), hal. 22.

<sup>11</sup> Ganewati Wuryandari, *Op. Cit*, hal. 35.

## 2. Fungsi Perbatasan

Secara sederhana, menurut Jean-Marc F. Blanchard perbatasan dapat diartikan sebagai suatu unit legal-politis yang mempunyai berbagai fungsi unik sekaligus strategis bagi suatu negara. Dalam konteks pemahaman semacam ini, perbatasan memiliki fungsi militer strategis, ekonomis, konstitutif, identitas, kesatuan nasional, pembangunan negara dan kepentingan domestik. Perbatasan sebagai fungsi ekonomis adalah sebagai penetapan wilayah tertentu dimana suatu negara dapat melakukan kontrol terhadap arus modal, perdagangan antar negara, investasi asing, pergerakan barang antar negara, dan juga memberikan patokan bagi suatu negara untuk melakukan eksplorasi sumber-sumber alam secara legal pada wilayah tertentu.<sup>12</sup>

Pemahaman mengenai perbatasan jauh lebih kompleks, karena keterkaitan yang sangat erat antara aspek fisik dan masyarakat yang menempati wilayah tersebut dan dengan negara, kegiatan ekonomi, dan budaya setempat. Oleh karena itu Brunnet-Jailly dalam tulisannya *Theorizing Borders: An Interdisciplinary Perspective* menyatakan, bahwa untuk

<sup>12</sup> Ganewati Wuryandari, *Op. Cit*, hal. 35.

menganalisis masalah perbatasan ada beberapa elemen yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut: 1) kekuatan pasar dan arus perdagangan (*market forces and trade flows*), 2) kebijakan pemerintah negara-negara yang berbatasan langsung (*policy activities of multiple levels of governments on adjacent borders*), 3) pengaruh faktor politis masyarakat di wilayah perbatasan (*the particular political clout of borderland communities*), 4) budaya khas masyarakat di wilayah perbatasan (*the specific cultures of borderland communities*). Pandangan Brunet-Jailly ini menandai perdebatan tentang fungsi dari perbatasan itu sendiri yang lebih memberikan bobot lebih pada aspek sosial, tidak semata pada aspek politik. Melalui pemahaman mengenai fungsi perbatasan ini, diyakini oleh Brunet-Jailly akan mampu secara efektif untuk mengurangi ketegangan di daerah perbatasan.<sup>13</sup>

### 3. Rezim Keamanan Perbatasan

Bagaimana dan seberapa jauh suatu negara menerapkan tata kelola keamanan perbatasan, sesungguhnya sangat tergantung pada kondisi negara itu

sendiri. Dari sudut pandang keamanan, ada dua macam rezim keamanan perbatasan yang lazim diterapkan oleh suatu negara dalam mengelola wilayah perbatasannya. Sistem yang pertama adalah "*hard-border regime*", yaitu rezim keamanan perbatasan yang menganut sistem perbatasan sangat ketat dengan penempatan pasukan bersenjata lengkap disetiap pos-pos perbatasan. Negara yang menganut *hard-border regime* biasanya berupaya untuk menutup rapat-rapat perbatasannya, untuk mencegah keluar-masuknya pelintas batas demi alasan keamanan nasional. Sistem yang kedua pada rezim keamanan perbatasan adalah "*soft border regime*" yang pada dasarnya memberlakukan pengamanan perbatasan tidak terlampau ketat. Sistem ini biasanya dianut oleh negara-negara di kawasan yang mengembangkan prinsip hidup berdampingan secara damai, dimana negara-negara di kawasan tersebut tidak merasa terganggu keamanannya oleh kehadiran negara tetangganya, sehingga tidak perlu membatasi lalu lintas pergerakan penduduk antarnegara.<sup>14</sup>

Di wilayah Asia Tenggara, suasana bersahabat dan kuatnya semangat

<sup>13</sup> Ibid, hal. 41-42.

<sup>14</sup> Ganewati Wuryandari, *Op. Cit.*, hal. 42-43.

hidup berdampingan secara damai membuat negara-negara ASEAN cenderung untuk mengembangkan sistem *soft-border regime* antar sesama anggota, namun maraknya ancaman kejahatan terorganisir transnasional, imigran gelap, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan dan sebagainya membuat sebagian negara (yang merasa terancam) mulai bergerak ke arah *hard-border regime*. Dalam masalah yang terjadi di perbatasan Indonesia -Timor-Leste ini sistem yang seharusnya diterapkan adalah mengkombinasikan antara *soft-border regime* dengan *hard-border regime*.<sup>15</sup>

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Sekilas Sejarah Berpisahnya Timor Leste dari Wilayah RI

Dalam beberapa dekade Timor Timur mengalami berbagai perubahan dan gejolak. Dari status tanah jajahan Portugis, perang saudara, berintegrasi dengan Republik Indonesia melalui sebuah piagam kesepakatan yang bernama Deklarasi Balibo tahun 1975, dan akhirnya melalui jajak pendapat yang dilaksanakan Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) tahun 1999, Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia. Selama lebih kurang 23 tahun berintegrasi dengan Indonesia sebagai provinsi ke-27, Timor Timur memilih opsi kemerdekaan ketimbang otonomi khusus, dua opsi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia. Rakyat Indonesia kecewa dengan hasil penentuan pendapat itu, apalagi bagi rakyat Timor Timur yang pro dan berjuang untuk mempertahankan integrasi.<sup>16</sup>

Sejarah perbatasan Indonesia – Timor-Leste saat ini tidak lepas dari sejarah masuknya Belanda ke wilayah Timor yang kemudian membagi wilayah ini menjadi dua bagian, yaitu Timor Portugis yang berpusat di Dili dan Timor Barat yang beribukota di Kupang. Pembagian ini sesungguhnya berlangsung sejak akhir abad ke-17 dan ditetapkan dalam suatu klausul traktat tahun 1904. Dalam konteks perebutan wilayah tersebut, tahun 1701 untuk pertama kalinya Portugis memproklamkan Timor Timur sebagai daerah koloninya dan pada saat yang bersamaan pihak Belanda pun

<sup>15</sup> Ibid, hal. 44.

<sup>16</sup> Abdul Salam Gani. *Dinamika Diplomasi Indonesia Dalam Praktik Disusun oleh Sejumlah Diplomat RI*. (Bekasi: Kesaint Blanc, 2003), hal. 61-62.

mengklaim Timor Barat sebagai wilayahnya.<sup>17</sup>

Ketika Timor Timur menjadi salah satu provinsi dari Republik Indonesia (1976-1999), isu perbatasan ini Timor Barat dan Timor Timur menjadi tidak relevan. Masalah perbatasan tidak pernah menjadi subjek utama pembicaraan lagi. Di samping itu, pembangunan berbagai fasilitas publik di sekitar daerah perbatasan oleh pemerintah Indonesia, seperti terminal antarkota, pasar tradisional, sekolah dan puskesmas telah membuat masyarakat Timor bagian barat dan timur, makin bebas bergerak tanpa harus peduli terhadap garis perbatasan. Dengan demikian tampak bahwa pada masa kekuasaan Indonesia di Timor-Leste, perbatasan bukan merupakan subjek yang relevan untuk dibicarakan baik di tingkat lokal maupun pemerintah pusat.<sup>18</sup>

Namun demikian, sejak kemerdekaan Timor-Leste tahun 2002, masalah perbatasan menjadi hal yang penting untuk dibicarakan antara pemerintah Indonesia maupun Timor-Leste. Langkah pertama yang dilakukan menjelang kemerdekaan Timor-Leste adalah menyepakati kembali tapal batas

yang pernah ada antara Timor Barat dan Timor Timur. Pada tanggal 2 Februari 2002 Menteri Luar Negeri RI Hasan Wirayuda dan pimpinan *United Nations Transitional Administration in East Timor* (UNTAET), Sergio Vierra de Mello, menandatangani kesepakatan untuk mengatur prinsip *uti possidetis juris* (dimana suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya), yaitu memakai Konvensi 1904 yang telah ditandatangani oleh pihak Belanda dan Portugis serta hasil keputusan Permanent Court of Arbitration (*Permanent Arbitral Awards*) 1914, sebagai dasar hukum yang mengatur perbatasan kedua negara. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh kedua pejabat penting yang mewakili Indonesia dan PBB di Denpasar, Bali.<sup>19</sup>

## 2. Aktivitas Ekonomi Ilegal di Perbatasan Indonesia – Timor-Leste

Insiden-insiden yang terjadi di perbatasan pada umumnya disebabkan oleh pelanggaran perbatasan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh penduduk dari kedua wilayah. Hal ini bisa terjadi karena garis batas yang tidak jelas, sungai yang

<sup>17</sup> Ganewati Wuryandari, *Op.Cit*, hal. 67.

<sup>18</sup> Ibid, hal. 73.

<sup>19</sup> Ganewati Wuryandari, *Op.Cit*, hal. 74.



merupakan batas alam alurnya berpindah-pindah saat hujan karena erosi. Sebab-sebab lainnya, antara lain kasus pencurian sapi, dan berbagai penyelundupan.<sup>20</sup>

Studi yang dilakukan oleh Bayu Setiawann dalam *Mobilitas Penduduk dan Pengembangan Potensi Perdagangan di Wilayah Perbatasan Nusa Tenggara Timur - Timor-Leste* mengenai mobilitas penduduk di daerah perbatasan mengatakan bahwa perekonomian wilayah perbatasan Timor-Leste sangat bergantung kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut studi ini, pemerintah Indonesia telah membangun tujuh pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan penduduk di daerah perbatasan, selain itu Pemerintah juga mendirikan Sembilan pintu keluar-masuk untuk lalu lintas orang dan barang yaitu empat di Kabupaten Belu (Mota'ain, Metamauk, Haekesak, dan Haumusu), empat di Kabupaten Timor Tengah Utara (Napan, Wini, Laktutut, dan Haumenimau), dan satu di Kabupaten Kupang (Oepoli). Studi tersebut juga mengatakan bahwa sebelum diberlakukan penggunaan visa dan paspor, perdagangan di daerah perbatasan sangat menguntungkan. Namun, setelah diperlakukan paspor dan visa, kegiatan

perdagangan di daerah perbatasan menjadi menurun drastis. Fenomena yang muncul adalah perdagangan ilegal dan kegiatan penyelundupan dari wilayah NTT ke Timor-Leste, dan dari arah sebaliknya yaitu dari Timor-Leste ke NTT. Aktivitas ekonomi ilegal ini, pada umumnya dilakukan melalui hutan, jalan setapak dan lokasi-lokasi tersembunyi di sepanjang tapal batas antara kedua negara.<sup>21</sup>

Salah satu permasalahan utama daerah perbatasan adalah ketertinggalan dan keterisolasian, sehingga daerah-daerah ini secara umum dapat dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Pengembangan wilayah perbatasan tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, tetapi juga akan bermanfaat dalam menciptakan stabilitas keamanan di daerah perbatasan itu sendiri. Meningkatnya kemiskinan masyarakat di daerah perbatasan, menyebabkan meningkatnya kegiatan ilegal dan membuka jalan bagi tindak kejahatan lintas perbatasan, seperti pembalakan liar, *illegal trading*, *illegal trafficking in person*, perdagangan wanita dan anak. Dengan demikian, salah satu upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan

<sup>20</sup> Abdul Salam Gani, *Op.Cit*, hal. 55.

<sup>21</sup> Dikutip dalam Ganewati Wuryandari, *Op.Cit*, hal. 215-216.

keamanan di perbatasan adalah menciptakan perlindungan kemanusiaan (*human security*) terhadap penduduk yang tinggal di daerah perbatasan itu sendiri.<sup>22</sup>

Aktivitas ekonomi ilegal ini terjadi karena adanya perbedaan harga bahan-bahan kebutuhan pokok antara Provinsi NTT dengan Timor-Leste, yang besar kisarannya bahkan mencapai tiga sampai empat kali lebih tinggi di Timor-Leste. Murahness dua kali lipat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia kisaran harga Rp. 5500-7500 sedangkan di Timor-Leste kisaran harganya lebih dari 1 US\$. Akibatnya tidak jarang kemudian masyarakat Timor-Leste berbondong-bondong, terutama pada akhir pekan membawa alat penampungan BBM untuk kemudian mengisinya berliter-liter BBM. Dengan alasan berlibur, kelompok masyarakat ini memanfaatkan kelonggaran aturan dan sikap mental penjaga perbatasan untuk meraih keuntungan dengan melakukan kegiatan ilegal. Adalah sesuatu yang tidak masuk akal, jika informasi yang telah meluas ini tidak tertangkap oleh aparat di lapangan. Dalam konteks penyelundupan BBM, modus operandi yang kerap terjadi adalah selain terjun langsung untuk kemudian

terlibat dalam aktivitas ilegal itu, oknum aparat terkait memang membiarkan aktivitas itu terjadi dengan harapan mendapat suatu imbalan.<sup>23</sup>

Selain BBM komoditi yang kerap kali diselundupkan adalah sembako. Penyelundupan jenis barang ini memang marak, mengingat bahwa sembako merupakan kebutuhan sehari-hari yang tidak murah di Timor-Leste. Sebagai gambaran mie instan yang sudah siap disantap dapat berharga 1,5 US\$ atau sekitar Rp. 14.000 di Timor-Leste. Padahal jika mie tersebut dijual di Indonesia harganya paling mahal hanya sepertiganya saja, itu pun sudah mendapatkan sebutir telur dan sayuran. Kondisi berlipat-lipatnya harga itu juga berlaku di beberapa komoditi juga, termasuk sabun dan rokok. Di sisi lain masyarakat Timor-Leste pun tidak memiliki banyak pilihan. Pola konsumsi yang telah berlangsung cukup lama, kemampuan daya beli masyarakatnya yang masih lemah dan letak geografis yang tidak memungkinkan negara tersebut membuka jalur dagang secara efisien dengan negara lain, telah memaksa masyarakat untuk terus mengkonsumsi barang-barang yang berasal dari

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid, hal. 306.

Indonesia. Meskipun sekarang ini sudah mulai berdatangan produk-produk yang berasal dari Thailand ataupun China, produk sembako dari Indonesia tetap menguasai pasar Timor-Leste setidaknya hingga saat ini.<sup>24</sup>

Kian maraknya penyelundupan yang terjadi dari Indonesia ke Timor-Leste, menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah perbatasan sangat lemah. Pemerintah kedua negara harus berupaya untuk memutuskan mata rantai itu. Tentang penegakan hukum kasus penyelundupan, Kapolda Ricky mengatakan jajarannya sudah menangani beberapa kasus. Bahkan ada keterlibatan anggota yang sementara diproses hukum karena turut serta sebagai penyelundup barang ke Timor-Leste. BBM dan sembako menjadi bahan primadona penyelundupan, selain itu penyelundupan sepeda motor juga makin marak terjadi.<sup>25</sup> Tingginya permintaan dan harga jual di Timor-Leste menjadi salah satu faktor penyebabnya, ditambah lagi Provinsi NTT hingga 70 persen adalah wilayah kelautan. Kapolda Ricky meyakini ada aktor

intelektual dalam penyelundupan barang seperti BBM, sembako dan barang lainnya sehingga barang bisa dipasok via Provinsi NTT. Kepolisian sudah berkoordinasi dengan aparat imigrasi, bea cukai untuk meneliti dan mengecek barang yang masuk ke Timor-Leste. Kendati demikian teknologi pengecekan barang di Timor-Leste lebih canggih dibandingkan dengan Indonesia.<sup>26</sup>

Pada tanggal 22 Desember 2015, Kepolisian Jawa Timur berhasil membongkar kasus penyelundupan puluhan motor dan mobil ke Timor-Leste. Kendaraan-kendaraan itu dikirim via Terminal Teluk Lamong, Surabaya menggunakan kontainer. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP, Takdir Mattanete megemukakan kasus ini berawal pada saat Polisi mengetahui ada kiriman mobil *pick up* ilegal. Total kendaraan yang diamankan berjumlah 46 kendaraan dari 11 kontainer yang akan diekspor. Kasus penyelundupan ini sama dengan kasus serupa yang ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada pertengahan Oktober dan akhir November 2015. Pada saat itu, polisi mengamankan

<sup>24</sup> Ganewati Wuryandari. *Op.Cit*, hal. 306-307.

<sup>25</sup> "Penegakan Hukum di Perbatasan Lemah, Penyelundupan Makin Marak" dalam *Suara Pembaruan* edisi 7 Januari 2013, diakses melalui <http://www.suarapembaruan.com/home/penegakan-hukum-di-perbatasan-lemah-penyelundupan-makin-marak/28797>, tanggal 6 November 2013.

<sup>26</sup> "Penegakan Hukum di Perbatasan Lemah, Penyelundupan Makin Marak" dalam *Suara Pembaruan* edisi 7 Januari 2013, diakses melalui <http://www.suarapembaruan.com/home/penegakan-hukum-di-perbatasan-lemah-penyelundupan-makin-marak/28797>, tanggal 6 November 2013.

25 mobil dan 11 motor di dalam 18 kontainer di Depo Meratus.<sup>27</sup>

Penyelundupan kendaraan ke Timor-Leste ternyata sudah sering dilakukan. Dari data bea cukai, selama dua tahun terakhir, sudah ada 1.021 kendaraan yang diselundupkan via pelabuhan dari Surabaya sejak tahun 2014.<sup>28</sup> Penyelundupan mobil hasil kejahatan ke Timor-Leste berhasil digagalkan aparat gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Bea dan Cukai Tanjung Priok. Pelaku menyelundupkan mobil tersebut dengan membuat dokumen ekspor asli tapi palsu. Dokumen ekspor, dokumen kepabeannya dituliskan dokumen mesin bekas, tetapi ternyata setelah dicek oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok ternyata berasal dari *leasing*.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Imam Wahyudiyanta, "Polisi Gagal Penyelundupan Puluhan Kendaraan ke Timor-Leste" dalam *detikNews*, edisi 22 Desember 2015. Tersedia dalam <http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3102744/polisi-gagalkan-penyelundupan-puluhan-kendaraan-ke-timor-leste>, diakses tanggal 17 Oktober 2016.

<sup>28</sup> Imam Wahyudiyanta, "Sebanyak 1.021 Kendaraan Diselundupkan ke Timor Leste Sejak 2014", dalam *detikNews*, edisi 23 Desember 2016. Tersedia dalam <http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3103652/sebanyak-1021-kendaraan-diselundupkan-ke-timor-leste-sejak-2014>, diakses tanggal 17 Oktober 2016.

<sup>29</sup> Mei Amelia R, "Palsukan Dokumen Ekspor, Begini Cara Sindikat Selundupkan Mobil ke Timor Leste", dalam *detikNews* edisi 28 Maret 2016. Tersedia dalam <http://news.detik.com/berita/d-3174401/palsukan-dokumen-ekspor-begini-cara-sindik>

Selain persoalan BBM dan sembako, aktivitas yang melibatkan aparat juga terjadi pada soal penjualan ternak secara ilegal. Dan hal ini kembali bermuara dari uniknya konsep pengelolaan lintas batas, yang mengakibatkan ketidakjelasan aturan main dan persepsi yang sama mengenai makna pelintasan batas ini. Dalam situasi ini ternak-ternak yang akan melintas, pertama kali akan berhadapan dengan oknum aparat yang dengan "otoritas" yang dimilikinya merasa berhak untuk melakukan pemeriksaan. Beberapa oknum, kemudian memanfaatkan "otoritas" itu untuk menarik biaya administrasi untuk kelancaran perjalanan ternak, yang akan dikirim ke wilayah negara tetangga. Tidak terdapat data pasti mengenai besaran yang ditarik, namun yang pasti telah cukup menyebabkan ekonomi biaya tinggi untuk ukuran bisnis di wilayah ini dan yang pasti pelanggaran hukum.<sup>30</sup>

Kegiatan ekonomi di perbatasan pada dasarnya menguntungkan kedua belah pihak, baik bagi masyarakat yang tinggal di Nusa Tenggara Timur maupun Timor-Leste. Dibentuknya zona-zona

[3174401/palsukan-dokumen-ekspor-begini-cara-sindik-selundupkan-mobil-ke-timor-leste](http://news.detik.com/berita/d-3174401/palsukan-dokumen-ekspor-begini-cara-sindik-selundupkan-mobil-ke-timor-leste), diakses tanggal 17 Oktober 2016.

<sup>30</sup> Ganewati Wuryandari, *Op.Cit*, hal. 306-307.

perdagangan khusus di sepanjang perbatasan yang menggunakan Pas Lintas Batas, akan mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan. Pada akhirnya, hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan, sekaligus mencegah terjadinya perdagangan gelap di jalan-jalan ilegal. Namun demikian, tentunya akan ada pihak yang dirugikan dari zona perdagangan ini, yaitu mereka yang sebelumnya memperoleh rente dari perdagangan ilegal, baik dijalur resmi maupun tidak resmi.

Terdapat sejumlah permasalahan yang timbul sebagai tindak lanjut pengaturan lintas barang antara Indonesia dan Timor-Leste, yaitu antara lain: 1) Pengawasan yang kurang ketat, sehingga perlintasan barang tidak terkontrol dengan baik, 2) Pihak Timor-Leste belum siap dalam pelaksanaan kesepakatan, terbukti belum dioperasikannya pasar tradisional, 3) Pemanfaatan perdagangan di perbatasan lebih banyak dimanfaatkan pelaku bisnis yang berasal dari kawasan luar perbatasan.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Ganewati Wuryandari, *Op.Cit.*, hal. 245-247.

#### D. Upaya Pemerintah Indonesia – Timor-Leste dalam Mengatasi Masalah Aktivitas Ilegal

Landasan pengelolaan perbatasan Indonesia – Timor-Leste tidak dapat dilepaskan dari konteks perjanjian di antara kedua negara. Hal ini berarti selain peraturan yang telah ditetapkan secara internal oleh masing-masing negara, pengelolaan perbatasan jelas tidak dapat dipisahkan dengan aturan main internasional dan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pemerintahan. Pada konteks yang lebih konkret pemerintahan kedua negara kemudian melakukan berbagai kesepakatan melalui forum bilateral yang memiliki implikasi aturan main dan aktivitas di perbatasan. Salah satunya adalah memutuskan untuk membentuk *Joint Border Committee* (JBC). Alasan terbentuknya badan ini adalah untuk melakukan akselerasi penyelesaian penetapan batas negara diantara kedua negara, dan membangun sebuah langkah-langkah yang lebih konkret dalam upaya mempererat kerjasama, terutama di bidang kesejahteraan dan ekonomi, dalam rangka membangun sebuah perbatasan yang aman dan layak bagi kemanusiaan.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Ibid.

Pemerintah Timor-Leste akan memberlakukan zona perdagangan di perbatasan Indonesia-Timor-Leste untuk membantu masyarakat di perbatasan mengembangkan ekonomi rumah tangganya. Feliciano da Costa, Consulado Timor-Leste untuk Indonesia menyatakan zona perdagangan perbatasan itu akan diberlakukan di wilayah Distrik Oeccuse dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. Menurutnya, aktivitas ekonomi dua negara di wilayah perbatasan sudah berlangsung lama dan merupakan salah satu pusat perdagangan tradisional sebelum Timor-Timur berpisah dari Indonesia. Kebijakan tersebut, akan disertai dengan kebijakan pemanfaatan pas lintas batas (PLB) warga dua negara yang akan melakukan aktivitas perdagangan di zona tersebut.<sup>33</sup>

Gubernur NTT Frans Lebu Raya berharap Pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu, wilayah batas Indonesia-Timor-Leste bisa dijadikan sentra dermaga singgah perdagangan internasional dengan Timor-Leste. Pelabuhan ini bisa meningkatkan ekonomi

warga di perbatasan tersebut. Letak geografis Pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu, yang sangat dekat dengan Timor-Leste, sangat strategis, jika dijadikan sebagai sentra pelabuhan perdagangan, ekspor dan impor sejumlah kebutuhan dari NTT ke Timor-Leste. Selama ini, perdagangan internasional dari Indonesia ke Timor-Leste baru dibuka melalui Surabaya dan Sulawesi Selatan. Padahal, NTT memiliki sejumlah potensi perdagangan yang bisa diekspor ke Timor-Leste, seperti tekstil, sembako, bahan bangunan, peralatan kendaraan bermotor serta sejumlah kebutuhan dasar lain. Sedangkan kebutuhan yang didatangkan dari Timor-Leste ke NTT, antara lain, kopi, kemiri, dan sejumlah jenis ternak. Pelabuhan laut Atapupu yang sangat potensial, mengingat pas lintas batas (PLB) baru diberlakukan di pos lintas batas Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Sedangkan di pintu perbatasan lain, seperti pintu utama Motaain dan Motamasin di Kabupaten Belu, belum diberlakukan.<sup>34</sup>

Sementara itu terkait dengan masalah kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, beberapa kesepakatan lanjutan terakhir menyangkut beberapa perjanjian

<sup>33</sup> "Timor Leste dan Indonesia Bikin Zona Perdagangan Perbatasan", dalam *Tempo* edisi 2 Juli 2013, diakses melalui <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/02/090492796/Timor-Leste-Bikin-Zona-Perdagangan-Perbatasan>, tanggal 6 November 2013.

<sup>34</sup> Ibid.

dagang dan nota kesepahaman, yakni *Trade Agreement between Indonesia and Timor-Leste* (Perjanjian Perdagangan antara Indonesia dan Timor-Leste), *Memorandum of Understanding on Technical Cooperation on Trade* (Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Teknis Perdagangan), *Memorandum of Understanding on Technical Cooperation concerning Small, Medium Industries* (Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Teknis di bidang Industri Kecil dan Menengah), *Memorandum of Understanding on Technical Cooperation on Drugs and Food Control* (Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Teknis Pengawasan Obat-obatan dan Makanan). Semua kesepakatan tersebut sesungguhnya masih terkait dengan hubungan bilateral Indonesia-Timor-Leste yang harus diratifikasi, dan menjadi bagian dari aturan main kedua negara termasuk di wilayah perbatasan.<sup>35</sup>

Sebagaimana dinyatakan Jean-March Blancard, perbatasan memiliki berbagai macam fungsi, yakni fungsi militer-pertahanan, fungsi ekonomi, fungsi konstitutif, fungsi identitas nasional, fungsi persatuan nasional, fungsi pembangunan negara-bangsa dan fungsi

pencapaian kepentingan domestik. Ketujuh fungsi yang dikonseptualisasikan oleh Blancard tersebut, mensyaratkan keterlibatan berbagai unsur dalam negara seperti militer, kepolisian, pejabat sipil, dan masyarakat umum, terutama warga di sekitar perbatasan dalam pengelolaan perbatasan. Di samping itu, pengelolaan keamanan perbatasan dapat ditempuh dengan cara, yakni “*hard border security regime*” yang lebih menekankan pada pengerahan aparat keamanan yang berupaya mencegah infiltrasi dari luar dan menghambat warganya untuk melintasi batas negaranya, maka “*soft border security regime*” lebih menekankan pada fungsi ekonomis dan sosial budaya dengan membuka pintu perbatasan seluas-luasnya bagi arus keluar-masuk penduduk dan barang dari dan ke luar negeri, tanpa takut adanya infiltrasi asing.<sup>36</sup>

### Kesimpulan

Pengelolaan aktivitas ekonomi di perbatasan Indonesia –Timor-Leste mengalami tantangan multidimensi yang kompleks. Belum tuntasnya tapal batas diantara kedua negara menjadikan kegiatan di daerah perbatasan menjadi samar, mana yang legal dan ilegal.

<sup>35</sup> Ganewati Wuryandari, *Op.Cit.*, hal. 248.

<sup>36</sup> Ibid, hal. 321-322.

Mengingat lemahnya hukum yang mengatur aktivitas ekonomi di perbatasan sehingga masih marak terjadi kasus penyelundupan. Upaya yang dilakukan kedua negara di perbatasan untuk membuat zona perdagangan dan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi di perbatasan harus ditunjang dengan tidak boleh ada lagi aktivitas ilegal yang terjadi di perbatasan kedua negara. Upaya yang bisa diterapkan untuk mengurangi kegiatan ilegal ini adalah menerapkan pengelolaan perbatasan *hard border security regime* dan *soft border security regime* dimana kebebasan membuka pintu perbatasan bagi arus keluar-masuk penduduk maupun barang masih tetap dijaga dan diawasi agar tidak terjadi proses penyelundupan. Kemudian meningkatkan pengawasan di jalur tidak resmi (jalan tikus) yang kerap kali digunakan untuk penyelundupan.

#### Referensi

- Buzan, Barry Ole Weaver and Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc.
- Gani, Abdul Salam. 2003. *Dinamika Diplomasi Indonesia Dalam Praktik* Disusun oleh Sejumlah Diplomat RI. Bekasi: Kesaint Blanc.
- Kuntari, CM Rien. 2009. *Timor-Timur Satu Menit Terakhir Catatan Seorang Wartawan*. Bandung: Mizan.
- M. Coelho, Avelino. 2012. *Dua Kali Merdeka Esei Sejarah Politik Timor Leste*. Yogyakarta: Djaman Baroe.
- Tan, T.H, Andrew, J.D Kenneth Boutin. 2001. *Non-Traditional Security Issues in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies.
- Wuryandari, Ganewati. 2009. *Keamanan Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Internet
- Mei Amelia R, "Palsukan Dokumen Ekspor, Begini Cara Sindikat Selundupkan Mobil ke Timor Leste", dalam *detikNews* edisi 28 Maret 2016. Tersedia dalam <http://news.detik.com/berita/d-3174401/palsukan-dokumen-ekspor-begini-cara-sindikatselundupkan-mobil-ke-timor-leste>, diakses tanggal 17 Oktober 2016.
- Imam Wahyudiyanta, "Polisi Gagal



## **Susunan Pengelola Jurnal WESTPHALIA:**

Jurnal Hubungan Internasional **WESTPHALIA** merupakan sebuah Jurnal yang secara khusus membahas tentang tema-tema keilmuan Hubungan Internasional. Redaksi mengundang para pemerhati hubungan internasional untuk menulis dengan panjang minimal 15 halaman kuarto, spasi ganda.

Redaksi berhak mengedit tanpa mengubah substansinya.

### **Pemimpin Umum**

Ade Priangani

### **Pemimpin Redaksi**

Agus Herlambang

### **Dewan Redaksi**

Aswan Haryadi,  
M.Budiana,  
Kunkunrat,  
Awang Munawar,  
Iwan Gunawan,  
Iwan B.Irawan,  
Fahreimi Imri,  
Bulbul Abdurahman,  
Rini Afriantari,  
Dewi Astuti,  
Sigid Harimurti,  
Anton Minardi,  
Alif Oktavian,  
Ch. Faurozi

### **Penyunting Pelaksana**

Sigit Harimurti

### **Sekretaris Redaksi**

Tine Ratna Poerwantika

### **Sekretariat**

Jajang Rohidin,  
Sri Susanti

### **Alamat Redaksi :**

Prodi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UNIVERSITAS PASUNDAN  
Jl. Lengkong Besar No. 68 Bnadung 40261  
Jawa Barat - Indonesia  
Tel/Faks : 022-4205945  
email : [adepriangani@rocketmail.com](mailto:adepriangani@rocketmail.com) atau  
[www.hi-unpas.co.cc](http://www.hi-unpas.co.cc) atau

